ANALISIS ELASTISITAS DAN TINGKAT KESULITAN
REALISASI Penerimaan Sumber Keuangan Daerah di
Kabupaten Sleman

Nano Prawoto
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
nanopra@yahoo.com

Abstract

This research focuses on measurement aspect of elasticity and
difficulty rate of local receipt realization in Sleman Regency. The
analysis which developed is regression model by partial adjustment
model (PAM). The result of this study shows that the elasticity of all
models more than 1 (E>1) or elastic. It means that local finance
interdependence on central payment in long term is relatively
decrease, assumed there is an economic growth (GDRB). This study
concludes that k coefficient ≥ 1 or close to zero means the difficulty
rate is relatively high, because it can not operate the local receipt
planning as the target. It is shown that local receipt administration
relatively bad. So that this research recommended that the local
government have to increase an economic growth for increasing
the local receipt, and an improvement on professionalism of
human resources.

Keywords : local receipt, elasticity, GDRP, Partial adjustment model

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang di
tempuh bangsa Indonesia selama
Pembangunan Jangka Panjang
Pertama (PJP I) telah menghasilkan
laju pertumbuhan ekonomi sebesar
rata-rata 7 % pertahun. Pembangunan
ekonomi tersebut dimulai sejak sejak
Pembangunan Lima Tahun Pertama
(Repelita I) tahun 1969 yang lalu, dan
proses pembangunan berjalan mulus
hingga tahun 1970-an dan 1980-an,
namun demikian tampaknya
pembangunan ekonomi Indonesia
tersebut juga beberapa kali telah
mengalami external shocks seperti
harga minyak mentah turun di pasar
internasional dan apresiasi nilai tukar
Yen terhadap dollar Amerika Serikat
selama tahun 1980-an dan yang paling
parah adalah saat terjadinya krisis
moneter pada akhir tahun 1997 dan
awal tahun 1998 yang lalu
pembangunan ekonomi Indonesia
terasa terhenti dan bahkan mengalami
pertumbuhan negatif sampai 13 %.

Krisis ekonomi dan politik bangsa
Indonesia sudah berlangsung kurang
lebih 5 tahun dan tanda-tanda perbaikan
tampaknya sudah mulai kelihatan,
meskipun belum dapat dikatakan sangat


Namun peluang itu hanya akan mempunyai arti bagi daerah, apabila daerah itu sendiri mau dan mampu mempersiapkan diri dengan baik. Dan sebaliknya menjadi sebuah persoalan baru, khususnya bagi wilayah yang secara ekonomi kurang layak untuk berdiri sendiri. Sehingga, persoalan yang kedua ini jika tidak ditangani dengan baik justru akan makin menyebabkan ketimpangan antar daerah yang makin besar. Di dalam teori pembangunan regional sendiri memang akan selalu ada trade-off antara efisiensi ekonomi dengan pemerataan pendapatan antar daerah atau interregional income equality (Mera, 1975)

Salah satu penyebab ketimpangan regional adalah kebijakan pembangunan yang terpusat, sehingga salah satu cara untuk meminimalisasi ketimpangan regional adalah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri daerahnya (otonomi daerah). Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan spesialisasi ekonomi daerah, atau biasa disebut dengan spesialisasi regional. Fenomena spesialisasi regional ini telah menimbulkan ketertarikan yang sangat besar di antara para ekonom (terutama ekonom regional), ahli geografi dan sejarawan. Sejak Adam Smith menulis

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman merupakan tantangan yang cukup berat jika dilihat dari sisi struktur keuangan daerahnya. Sumber penerimaan daerah tersebut kalau kita lihat pada struktur pendapattannya, ternyata sumber penerimaan keuangan daerah masih didominasi oleh pos sumbangan dan bantuan pemerintah pusat atau dana perimbangan yang Rory sangatlah tinggi dengan sumber penerimaan asli daerah (PAD) hanya memberi kontribusi sebesar lebih kurang 25%. Namun demikian untuk pos penerimaan dari PAD menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sedang penerimaan dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat atau dana perimbangan menunjukkan kecenderungan yang menyusut.


Potensi lain yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan otonomi daerah adalah potensi sumber daya manusia yang ada. Secara kasar sumber daya manusia di Kabupaten Sleman tampaknya cukup memadai, untuk menjalankan fungsi-fungsi birokrasi secara profesional. Namun demikian, kondisi aparatur maupun perangkat kelembagaan yang ada masih perlu ditinjau dan dianalisis lebih mendalam, terutama menyangkut implementasi otonomi daerah di tingkat kecamatan dan desa, karena ara kebijakan pembangunan daerah sekarang ini akan dikembangkan di tingkat kecamatan-kecamatan yang menjadi basis atau pusat pertumbuhan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sleman dan sektor-sektor yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perlu dicermati kembali, sektor mana yang menjadi andalan daerah, menjadi unggulan untuk dikembangkan, sehingga kecamatan dan kabupaten menjadi pusat-pusat pertumbuhan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, ada pertanyaan sejauhmana perubahan PDRB telah memberikan pengaruh kepada pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD), pendapatan asli daerah
(PAD), yang semasa otonomi daerah ini menjadi andalan daerah dalam menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berapa besar nilai elastisitas dari sumber penerimaan keuangan daerah tersebut, dengan tingkat kesulitan realisasi sumber penerimaan keuangan daerah berkaitan dengan perubahan PDRB. Untuk menjawab hal tersebut perlu melakukan penelitian dengan judul "Analisis Elastisitas Dan Tingkat Kesulitan Realisasi Penerimaan Sumber Keuangan Daerah Di Kabupaten Sleman "

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan persoalan-persoalan disebutkan di atas tadi, dalam studi ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:


TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah di atas, maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perpajakan dan sumber penerimaan keuangan daerah lainnya di Kabupaten Sleman periode 1991 – 2003. Dan untuk mencapai maksud tersebut, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui tingkat kepekahan (elastisitas) dari perubahan PDRB terhadap perubahan penerimaan Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya di Kabupaten Sleman.

2. Mengetahui tingkat kesulitan realisasi penerimaan Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya di Kabupaten Sleman.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh beberapa manfaat, terutama berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan dan menggali potensi keuangan daerah di Kabupaten Sleman, dan manfaat yang lain sebagai berikut:

1. Secara ilmiah, dapat menambah wawasan pengembangan ilmu ekonomi publik, khususnya berkaitan dengan pengembangan ilmu ekonomi keuangan daerah.

2. Dapat digunakan sebagai informasi awal untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan khususnya dalam aspek keuangan daerah di daerah penelitian.
TINJAUAN PUSTAKA


Pengalihan kewenangan ke Tingkat II menjanjikan pengembangan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pembangunan sistem yang semakin demokratis. Tetapi otonomi di Tingkat II untuk beberapa tahun mendatang, mungkin sampai 10 tahun, belum tentu menjamin terselenggaranya pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien karena pengembangan kebijakan dan pembangunan kelembagaan dan kemampuan di banyak daerah Tingkat II akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Lemahnya pengembangan kebijakan serta kelembagaan dan kemampuan di daerah sangat tampak dari minimnya prakarsa di daerah dan usulan-usulan yang datang dari daerah untuk melaksanakan program desentralisasi dan otonomi daerah. Di waktu lalu pembangunan daerah digagaskan dan dilaksanakan terutama oleh pusat. Kini terdapat bahaya bahwa proses desentralisasi juga akan diselenggarakan secara tersentralisasi.

Peranan pusat mungkin akan tetap besar dalam bidang fiskal. Arsitektur fiskal pola lama sangat timpang secara vertikal walaupun cukup seimbang secara horizontal. Dorongan untuk merombak arsitektur ini sangat masuk akal tetapi bila tidak dirancang dengan baik bisa menghasilkan arsitektur fiskal yang kurang timpang secara vertikal tetapi penuh dengan ketimpangan secara horizontal. Suatu keseimbangan vertikal dan horizontal merupakan prasyarat bagi terjaganya kesatuan bangsa. Dalam rancangbun baru peranan pusat untuk menjaga keseimbangan horizontal itu dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang mungkin akan tetap besar selama 10 tahun mendatang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu pencerminan kemampuan daerah, tetapi keragaman yang besar dalam kemampuan itu sudah menunjukkan bahwa selain masalah sequencing dalam desentralisasi dan pemberian otonomi juga perlu dirancang pelaksanaan bertahap sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Data-data untuk tahun 1996 menunjukkan bahwa secara rata-rata
PAD untuk 53 kotamadya mencapai sekitar 22,4% dari total penerimaan sedangkan PAD untuk 232 kabupaten mencapai 10,3%. Suatu pemetaan berdasarkan PDRB per kepala dan PAD sebagai persen dari total penerimaan menunjukkan bahwa dari jumlah kabupaten tersebut hanya 17 kabupaten (4 di luar Jawa dan Bali) mempunyai PAD dan PDRB per kepala di atas rata-rata, sedangkan 103 kabupaten mempunyai PAD dan PDRB per kepala di bawah rata-rata. Untuk ke 53 kotamadya, hanya 8 kotamadya (sema di Jawa dan Bali) yang mempunyai PAD dan PDRB per kepala di atas rata-rata, sedangkan sebanyak 26 atau sekitar 50 persen, berada di bawah rata-rata.

Program desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pekerjaan besar dan harus berhasil dengan baik. Melihat keragaman kemampuan maka pelaksanaannya harus didasarkan pada sequencing yang jelas dan penerapan bertahap menurut kemampuan daerah. Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program desentralisasi yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai akan mengganggu pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi daerah sendiri. Maka sangat mungkin diperlukan suatu kesepakatan baru. Proses desentralisasi tidak perlu diakseselerasi, namun yang perlu diakseselerasi adalah pengembangan kelembagaan dan kemampuan, termasuk untuk pengembangan kebijakan, pada tingkat daerah — khususnya daerah Tingkat II. Ini merupakan kerja nasional yang harus mendapat prioritas pertama dan dilaksanakan terutama di daerah. Inilah inti dari pemberdayaan ekonomi daerah yang merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien. (Hadi Soesastro, 2000)

Elastisitas Sumber Keuangan Daerah


Dasar pemikiran tersebut menunjukkan bahwa sumber keuangan daerah mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu daerah. Dalam struktur APBD di Kabupaten Sleman, dari sisi penerimaan telah mendukung pembiayaan khususnya pengeluaran rutin, meskipun masih relatif rendah bila dilihat dari indeks kemampuan rutinha (IKR). Rendahnya IKR ini memercikan pula relatif rendahnya kinerja Pemda dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah. Ini menunjukkan bahwa jenis pungutan penerimaan keuangan di Kabupaten Sleman juga relatif rendah. Sulit dipahami bila jenis pungutan tergolong


\[
\ln R_t = \ln (k_b) + (k_b) \ln Y_t + (1-k) \ln R_{t-1} + \ln (kV_t + U_t)
\]

Atau

\[
\ln R_t = \ln a_0 + a_1 \ln Y_t + a_2 \ln R_{t-1}
\]

Dimana:

- \(a_1\) = Menunjukkan koefisien elastisitas bruto (E)
- \(a_2 = 1 - k\) : koefisien penyesuaian \(k = 1 - a_2\), dimana k menunjukkan tingkat kesulitan

Penelitian ini juga menggunakan model seperti di atas. Dari persamaan tersebut dapat diketahui koefisien elastisitas \((a_1)\) dan koefisien penyesuaian \((k)\) untuk mengetahui tingkat kesulitan realisasi penerimaan sumber keuangan daerah. Selanjutnya dapat pula diketahui tingkat keterlambatan pemungutan dalam satuan waktu tahun, bulan dan hari.

Parameter pengukuran tingkat elastisitas dirumuskan sebagai berikut: Jika \(E > 1\), elastis artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau daa perimbangan dalam jangka panjang relatif semakin berkurang, atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah sangat responsif terhadap perubahan PDRB. Juga menunjukkan struktur tarif penerimaan daerah yang progresif.
Jika $E < 1$, inelastis artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif semakin bertambah, atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah kurang responsif terhadap perubahan PDRB. Juga menunjukkan struktur tarif penerimaan daerah yang regresif. Jika $E = 1$, unitary artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif tidak berubah, atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah relatif tidak responsif terhadap perubahan PDRB. Juga menunjukkan struktur tarif penerimaan daerah yang proporsional.

Parameter pengukuran tingkat kesulitan dirumuskan sebagai berikut: Jika $k \leq 1$, atau mendekati satu artinya tingkat kesulitan relatif rendah, karena telah dapat merealisasikan rencana penerimaan sumber keuangan daerah, atau dengan pengertian yang sama ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif semakin berkurang. Juga menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif baik.

Jika $k \geq 0$, atau mendekati nol artinya tingkat kesulitan relatif tinggi, karena tidak dapat merealisasikan rencana penerimaan sumber keuangan daerah, atau dengan pengertian yang sama ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif semakin bertambah dan besar. Juga menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif kurang baik.

**HIPOTESIS**

Berdasarkan gambaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan penerlitian dan kerangka pemikiran di atas maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga perubahan penerimaan penerimaan Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya di Kabupaten Sleman semakin besar sebagai akibat dari perubahan PDRB atau koefisien $E > 1$ yaitu sistem penerimaan sumber keuangan daerah sangat responsif terhadap perubahan PDRB. Artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif semakin berkurang.

2. Diduga tingkat kesulitan realisasi penerimaan sumber keuangan daerah di Kabupaten Sleman relatif rendah (sedang), dengan koefisien $k > 1$ atau telah dapat merealisasikan penerimaan dari target yang direncanakan yang menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif baik.
METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian


Jenis dan Sumber Data


Metode Analisis


Model awal adalah sebagai berikut:

\[ \ln T = \ln K + E \ln Y \]  \[1\]

Dimana :

- \( T \) = Penerimaan pajak
- \( Y \) = PDRB
- \( K \) = Konstanta
- \( E \) = Koeisien elastisitas

Kemudian diubah dalam persamaan sebagai berikut :

\[ R^* = b_1 + b_2 Y_t + U_t \]  \[2\]

Dimana :

- \( R^* \) = Penerimaan pajak yang diinginkan pada tahun \( t \)
- \( Y_t \) = PRDB pada tahun \( t \)

Karena \( R^* \), dianggap fungsi linier dari \( Y_t \) (PDRB), dan tidak dapat diobservasi. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan Adjustment Equation, sebagai berikut :
\[ R_t - R_{t-1} = k(R^*_t - R_{t-1}) + V_t; 0 \leq k \leq 1 \]  \hspace{1cm} [3]

dimana :
\[ R_t - R_{t-1} = \text{Penerimaan pajak yang} \]
dapat direalisasikan
\[ R^*_t - R_{t-1} = \text{Penerimaan pajak yang} \]
\[ k = \text{Koefisien penyesuaian} \]
\[ (= \text{tingkat kesulitan}) \]

makna akan diperoleh persamaan berikut :
\[ R_t - R_{t-1} = k[(b_1 + b_2 Y_t - U_t) - R_{t-1}] + V_t \]  \hspace{1cm} [4]

Persamaan [4] tersebut dibagi dengan : \( R_{t-1} \) menjadi :
\[ \begin{align*}
R_t - R_{t-1} &= k(b_1 + b_2 Y_t - U_t) - \frac{k R_{t-1}}{R_{t-1}} + \frac{V_t}{R_{t-1}} \\
R_{t-1} &= \frac{k}{R_{t-1}} \left( b_1 + b_2 Y_t - U_t \right) + \frac{V_t}{R_{t-1}}
\end{align*} \]  \hspace{1cm} [5]

Persamaan [6] dikalikan dengan :
\[ R_t = \frac{k}{R_{t-1}} b_1 + k b_2 Y_t + k U_t + (1-k) R_{t-1} + V_t \]  \hspace{1cm} [7]

Atau dapat dituliskan :
\[ R_t = k b_1 + k b_2 Y_t + (1-k) R_{t-1} + (k U_t + V_t) \]  \hspace{1cm} [8]

Atau dalam bentuk \textit{Cobb Douglass} dituliskan :
\[ R_t = k b_1 Y_t^{1-k} R_{t-1}^{(1-k)} (k U_t + V_t) \]  \hspace{1cm} [9]

Persamaan [9] tersebut dapat ditulis kembali :
\[ \ln R_t = \ln (k b_1) + (k b_2) \ln Y_t + (1-k) \ln R_{t-1} + \ln (k U_t + V_t) \]  \hspace{1cm} [10]

Atau dapat diringkas :
\[ \ln R_t = \ln a_2 + a_1 \ln Y_t + a_2 \ln R_{t-1} \]  \hspace{1cm} [11]
Dimana :
\[ a_2 = 1 - k \]
\[ k = 1 - a_2 \]
Nilai k antara \( 0 \leq k \leq 1 \)


Keterangan :
\[ R_t = \text{Penerimaan pajak} \]
\[ Y_t = \text{PDRB} \]
\[ R_{t-1} = \text{Penerimaan pajak pada tahun} \]
\[ \text{sebelumnya} \]
a_1, a_2 = \text{Koefisien regresi (E)}
k = \text{Koefisien penyesuaian (tingkat}
\[ \text{kesulitan}) \]
\[ V_t, U_t = \text{Variabel pengganggu} \]

Nilai koefisien elastisitas (a_1), yang diartikan sebagai perubahan penerimaan sumber keuangan daerah yang berkaitan dengan perubahan pendapatan regional (PDRB). Tingkat kesulitan (k) dapat diestimasi : apabila k mendekati atau sama dengan satu berarti tingkat kesulitan relatif rendah, karena telah dapat merealisasikan rencana (target) penerimaan, sebaliknya jika mendekati atau sama dengan nol berarti tingkat kesulitan relatif tinggi. Karena tidak bisa merealisasikan target penerimaan yang direncanakan. Sebagai ukuran interpretasi nilai k tersebut dibagi menjadi tiga kualifikasi tingkat kesulitan sebagai berikut :

\[ \text{...} \]

24
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat ini merupakan bagian yang menyajikan dan menguraikan sejauh mana aplikasi model PAM dalam analisis Elastisitas Dan Tingkat Kesulitan Realisasi Penerimaan Sumber Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman Periode 1994 - 2003 berdasarkan pengujian empiris. Akan tetapi, sebelum sampai kepada analisis tersebut terlebih dahulu akan dipaparkan rangkaian hasil pengujian empiris mengenai validasi asumsi OLS (ordinary least square), yang biasa disebut asumsi klasik (uji otolorelasi, hetroskedastisitas, dan uji multikolinieritas). Kemudian diikuti hasil estimasi model dengan diawali pengujian statistik (uji-t, uji- F) dan perhitungan R².

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nilai k</th>
<th>Interpreatasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0% - 49%</td>
<td>Mempunyai tingkat kesulitan relatif sangat tinggi dari target penerimaan yang direncanakan</td>
</tr>
<tr>
<td>50% - 74%</td>
<td>Mempunyai tingkat kesulitan relatif sedang (cukup tinggi) dari target penerimaan yang direncanakan</td>
</tr>
<tr>
<td>75% - 100%</td>
<td>Mempunyai tingkat kesulitan relatif rendah dari target penerimaan yang direncanakan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pengujuan Validasi Asumsi Klasik

a. Autokorelasi


| Tabel 1. Asumsi OLS: Ringkasan Hasil Uji Otokorelasi Terhadap Model
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Model</td>
<td>Dw-test (d)</td>
<td>Dw-test (h)</td>
<td>Dw-tabel   5%</td>
<td>Ho: *)</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 1 (Pajak Daerah)</td>
<td>2.078 (-0.133)</td>
<td>-1.96 &lt; h &lt; 1.96</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 2 (Retribusi Daerah)</td>
<td>2.237 (-0.136)</td>
<td>-1.96 &lt; h &lt; 1.96</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 3 (PAD)</td>
<td>2.410 (-0.702)</td>
<td>-1.96 &lt; h &lt; 1.96</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 4 (Lab Daerah)</td>
<td>2.849 (-1.404)</td>
<td>-1.96 &lt; h &lt; 1.96</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 5 (Penerimaan Dinas)</td>
<td>2.261 (-0.396)</td>
<td>-1.96 &lt; h &lt; 1.96</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 6 (Penerimaan Lain)</td>
<td>2.498 (-0.644)</td>
<td>-1.96 &lt; h &lt; 1.96</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Pengolahan data
Catatan: *) Uji Ho: Dengan h-statistics test karena autokoregrosif, rumus dapat dilihat di buku.
Dari olah data pada tabel 1, tersebut menunjukkan bahwa semua model yang diestimasi tidak ada otokorelasi, yaitu dengan ditunjukkan oleh nilai $h$-statistics antara -1.96 dan 1.96 (Z-tabel), hipotesis Ho menyatakan bahwa tidak terdapat first order autocorrelation diterima, sehingga tidak mengandung autokorelasi dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain atau dengan kata lain variabel gangguan tidak random.

b. Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas sehingga model kurang valid. Dari amatan dalam gambar scetterplot model 1 pajak daerah (Gambar 1) di bawah menunjukkan bahwa gambar tidak menunjukkan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

![Gambar 1. Scatterplot Model 1 (Pajak Daerah)](image1)

Scatterplot Model 2 (Retribusi Daerah)

![Gambar 2. Scatterplot Model 2](image2)
Pada model 2 Retribusi Daerah (Gambar 2) menunjukkan adanya pola yang agak sedikit jelas, serta titik-titik menyebar di atas lebih banyak dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga sedikit terjadi heteroskedastisitas.

Namun demikian dalam penelitian ini tidak dilakukan perbaikan atau transformasi data karena pola titik-titik yang tergambar masih kurang jelas.

Pada model 3 Pendapatan Asli Daerah (Gambar 3) menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 3.
Scatterplot Model 3 (Pendapatan Asli Daerah)

Pada model 4 Laba Daerah (Gambar 4) menunjukkan tidak adanya pola yang jelas juga, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.
Scatterplot Model 4 (Laba Daerah)

Pada model 5 Penerimaan Dinas (Gambar 5) menunjukkan tidak adanya pola yang jelas juga, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.
Pada model 6 Penerimaan Lain (Gambar 6) menunjukkan tidak adanya pola yang jelas lagi, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas berdasarkan pendekatan toleransi (TOL) dan faktor inflasi varians (VIF) dengan perhitungan komputer program SPSS 11.0 dapat diketahui seperti pada Tabel 2. Dari nilai-nilai tersebut terlihat bahwa, pada model 1 hingga model 6 tidak terjadi penolakan terhadap Ho atau Ho diterima, dengan demikian mengindikasikan bahwa pada persamaan tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinieritas.
Tabel 2.
Asumsi OLS: Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas pada Model 1 – 6 Menggunakan Metoda Toleransi (TOL) dan Faktor Inflasi Varians (VIF)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Model</th>
<th>Variabel Terikat</th>
<th>Variabel Bebas</th>
<th>TOLi</th>
<th>VIFi</th>
<th>Ho</th>
<th>Kesimpulan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Model 1</td>
<td>Ln PD</td>
<td>Ln PDRB, Lag PD</td>
<td>0.168</td>
<td>5.968</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada multikolinieritas</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 2</td>
<td>Ln RD</td>
<td>Ln PDRB, Lag RD</td>
<td>0.0705</td>
<td>1.419</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada multikolinieritas</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 3</td>
<td>Ln PAD</td>
<td>Ln PDRB, Lag PAD</td>
<td>0.197</td>
<td>5.081</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada multikolinieritas</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 4</td>
<td>Ln LD</td>
<td>Ln PDRB, Lag LD</td>
<td>0.257</td>
<td>3.887</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada multikolinieritas</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 5</td>
<td>Ln PDS</td>
<td>Ln PDRB, Lag PDS</td>
<td>0.609</td>
<td>1.643</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada multikolinieritas</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 6</td>
<td>Ln PL</td>
<td>Ln PDRB, Lag PL</td>
<td>0.277</td>
<td>3.611</td>
<td>diterima</td>
<td>tidak ada multikolinieritas</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Pengolahan data

Hasil Estimasi Model Regresi

Tabel 3.
Estimasi Model: Ringkasan Hasil Regresi Model

<table>
<thead>
<tr>
<th>Model</th>
<th>Variabel Terikat</th>
<th>Unstandardized Coefficient</th>
<th>t</th>
<th>Sig</th>
<th>F</th>
<th>Sig</th>
<th>R²</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>B</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Model 1</td>
<td>Contanta</td>
<td>-38.818</td>
<td>-2.251</td>
<td>0.051</td>
<td>197.098</td>
<td>0.000</td>
<td>0.978</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ln PDRB</td>
<td>2.048</td>
<td>2.274</td>
<td>0.049***</td>
<td>0.000****</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lag PD</td>
<td>0.738</td>
<td>5.999</td>
<td>0.181**</td>
<td>0.320</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Model 2</td>
<td>Contanta</td>
<td>-67.452</td>
<td>-2.322</td>
<td>0.219</td>
<td>3.449</td>
<td>0.077</td>
<td>0.434</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ln PDRB</td>
<td>3.679</td>
<td>1.449</td>
<td>0.921**</td>
<td>0.620 ***</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lag RD</td>
<td>0.336</td>
<td>1.051</td>
<td>0.181**</td>
<td>0.320</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Model 3</td>
<td>Contanta</td>
<td>-33.661</td>
<td>-2.373</td>
<td>0.042</td>
<td>208.053</td>
<td>0.000</td>
<td>0.979</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ln PDRB</td>
<td>1.776</td>
<td>2.364</td>
<td>0.042***</td>
<td>0.620 ***</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lag PAD</td>
<td>0.784</td>
<td>6.869</td>
<td>0.000***</td>
<td>0.620 ***</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Model 4</td>
<td>Contanta</td>
<td>-67.330</td>
<td>-2.583</td>
<td>0.030</td>
<td>67.552</td>
<td>0.000</td>
<td>0.938</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ln PDRB</td>
<td>3.474</td>
<td>2.620</td>
<td>0.028***</td>
<td>0.620 ***</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lag LD</td>
<td>0.575</td>
<td>3.485</td>
<td>0.000***</td>
<td>0.620 ***</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Model 5</td>
<td>Contanta</td>
<td>-79.760</td>
<td>-2.067</td>
<td>0.108</td>
<td>9.363</td>
<td>0.031</td>
<td>0.824</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ln PDRB</td>
<td>4.164</td>
<td>2.138</td>
<td>0.099**</td>
<td>0.185*</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lag PDS</td>
<td>0.453</td>
<td>1.598</td>
<td>0.185*</td>
<td>0.185*</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Model 6</td>
<td>Contanta</td>
<td>-26.299</td>
<td>-0.468</td>
<td>0.651</td>
<td>15.953</td>
<td>0.001</td>
<td>0.780</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ln PDRB</td>
<td>1.347</td>
<td>0.472</td>
<td>0.648</td>
<td>15.953</td>
<td>0.001</td>
<td>0.780</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lag PL</td>
<td>0.874</td>
<td>2.561</td>
<td>0.031***</td>
<td>0.185*</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Pengolahan data

* = Signifikant pada derajat kepercayaan 20%
** = Signifikant pada derajat kepercayaan 10%
*** = Signifikant pada derajat kepercayaan 5%
**** = Signifikant pada derajat kepercayaan 1%
a. Model 1:
Dariolah data menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel PDt-1 sangat menyakinkan atau signifikan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel PD (Pajak Daerah) dengan derajat kesalahan 5% dan 1%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan PDt-1) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 1%. Dilihat dari angka R² sebesar 0.978 mengidikasikan bahwa hanya 97.8% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (PD) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan PDt-1), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 2.2%.

b. Model 2:
Dariolah data menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel PDt-1 kurang menyakinkan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel RD (Retribusi Daerah) dengan derajat kesalahan yang relatif tinggi yaitu 20%. Pada uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan RDt-1) mempengaruhi variabel terikat dengan kurang menyakinkan juga dengan derajat kesalahan 10%. Dilihat dari angka R² sebesar 0.434 mengidikasikan bahwa hanya 43.4% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (RD) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan RDt-1), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 56.6%. Hal ini terlihat bahwa masih terdapat variabel di luar model yang banyak mempengaruhi variasi variabel terikat.

c. Model 3:
Dari tersebut di atas model 3 menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel PADt-1 sangat menyakinkan atau signifikan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan derajat kesalahan 5% dan 1%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan PADt-1) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 1%. Dilihat dari angka R² sebesar 0.979 mengidikasikan bahwa hanya 97.8% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (PAD) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan PADt-1), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 2,1%. Angka tersebut merupakan angka terbesar dari semua model yang ada, berarti secara nyata di Kabupaten Sleman Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh PDRB daerah yang merupakan nilai produksi yang dihasilkan di Sleman.

d. Model 4:
Dari tersebut di atas model 4 menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel LDt-1 sangat menyakinkan atau signifikan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel LD (Laba Usaha Daerah) dengan derajat kesalahan 5% dan 1%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan LDt-1) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 1%. Dilihat dari angka R² sebesar 0.938 mengidikasikan bahwa hanya 93.8% keragaman nilai
atau variasi variabel terikat (LD) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan LD\textsubscript{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 6,2%.

e. Model 5 :

Dari tersebut di atas model 5 menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel PDS\textsubscript{t-1} kurang menyakinkan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel PDS (Penerimaan Dinas-dinas) dengan derajat kesalahan 10% dan 20%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan PDS\textsubscript{t-1}) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 5%. Dilihat dari angka R\textsuperscript{2} sebesar 0.824 mengindikasikan bahwa hanya 82,4% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (PDS) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan PDS\textsubscript{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 17,6%.

f. Model 6 :

Dalam model terakhir model 6 menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD tidak menyakinkan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel PL (Penerimaan Lain), sedangkan variabel lag PL berpengaruh dengan derajat kesalahan 5%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan PL\textsubscript{t-1}) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 1%. Dilihat dari angka R\textsuperscript{2} sebesar 0.78 mengindikasikan bahwa hanya 78% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (PL) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan PL\textsubscript{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 22%.

Analisis Elastisitas dan Tingkat Kesulitan Realisasi Penerimaan Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini menggunakan formulasi Adjustment Equation Model yang digunakan untuk mengetahui koefisien elastisitas dan koefisien penyesuaian yang diadapteskian untuk mengetahui tingkat kesulitan realisasi sumber penerimaan pada struktur keuangan daerah, dan dapat diketahui pula tingkat keterlambatan penggunaan. Seperti pada bab 3 bahwa, spesifikasi model awal adalah sebagai berikut :

\[
\ln T = \ln K + E \ln Y
\]

Dimana :
\[
T = \text{Penerimaan pajak}
\]
\[
Y = \text{PDRB}
\]
\[
K = \text{Konstanta}
\]
\[
E = \text{Koefisien elastisitas}
\]

Kemudian disesuaikan dalam bentuk PAM menjadi :

\[
\ln R_1 = \ln a_0 + a_1 \ln Y_t + a_2 \ln R_{t-1}
\]

Dimana :
\[
a_2 = 1 - k
\]
\[
k = 1 - a_2 \quad \text{(koefisien penyesuaian/tengkat kesulitan)}
\]

Nilai k antara 0 \leq k \leq 1

Dengan demikian dari persamaan tersebut diperoleh nilai koefisien elastisitas (a\textsubscript{1}) dan nilai adjustment equation (koefisien penyesuaian) k atau disebut tingkat kesulitan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan
penerimaan keuangan daerah. Nilai koefisien elastisitas \(a_i\), yang diartikan sebagai perubahan penerimaan sumber keuangan daerah yang berkaitan dengan perubahan pendapatan regional (PDRB).

Dari perhitungan olah data di atas (tabel 3), dapat diperoleh informasi nilai \(E(a_i)\) atau koefisien elastisitas dan nilai \(k = 1 - a_2\) yang disebut nilai tingkat kesulitan sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Model</th>
<th>Koefisien Elastisitas</th>
<th>Koefisien Penyesuaian</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Nilai (E(a_i))</td>
<td>Kualifikasi</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 1</td>
<td>2,048 &gt; 1</td>
<td>Elastis</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 2</td>
<td>3,679 &gt; 1</td>
<td>Elastis</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 3</td>
<td>1,776 &gt; 1</td>
<td>Elastis</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 4</td>
<td>3,474 &gt; 1</td>
<td>Elastis</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 5</td>
<td>4,164 &gt; 1</td>
<td>Elastis</td>
</tr>
<tr>
<td>Model 6</td>
<td>1,347 &gt; 1</td>
<td>Elastis</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Pengolahan Data (Lampiran 1-6)*

Dari tabel 4, tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman dalam parameter pengukuran tingkat elastisitas dalam semua model menunjukkan \(E > 1\) atau *elastis* artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif *semakin berkurang*, dengan asumsi terdapat pertumbuhan ekonomi (PDRB) atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah sangat responsif terhadap perubahan PDRB. Juga menunjukkan struktur tarif penerimaan daerah yang progresif, sehingga jika PDRB daerah di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang signifikan maka ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang, dan sebaliknya.

Namun demikian jika dilihat dari parameter pengukuran tingkat kesulitan menunjukkan bahwa koefisien \(k \leq 0\), atau mendekati nol artinya tingkat kesulitan relatif tinggi, karena tidak dapat merealisasikan rencana penerimaan sumber keuangan daerah, atau dengan pengertian yang sama ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang *relatif semakin bertambah dan besar*. Juga menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif kurang baik.

Dari dua koefisien tersebut antara koefisien elastisitas dan koefisien penyesuaian menunjukkan kondisi yang kontradiktif, satu sisi sumber penerimaan keuangan daerah Kabupaten Sleman sangat responsif terhadap perubahan PDRB, tetapi pada sisi yang lain menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah masih kurang baik. Dari kondisi tersebut peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membuat suatu
kebijakan yang berpihak pada kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum, adalah sebagai berikut:

1. Dalam estimasi model yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa semua model menunjukkan kondisi yang hampir sama yaitu, variabel bebas (PDRB dan lag variabel penerimaan daerah) baik secara partial maupun simultan mempengaruhi variabel tidak bebas (variabel penerimaan daerah) secara signifikan. Juga variasi perubahan variabel tidak bebas ditentukan oleh variabel bebas dengan prosentase yang cukup tinggi dengan rata-rata di atas 80%, kecuali model 2 yang relatif rendah.

2. Analisis tingkat elastisitas di Kabupaten Sleman dapat disimpulkan bahwa, tingkat elastisitas dalam semua model menunjukkan $E > 1$ atau elastis artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif semakin berkurang, dengan asumsi terdapat pertumbuhan ekonomi (PDRB) atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah sangat responsif terhadap perubahan PDRB.

3. Pada analisis tingkat kesulitan realisasi penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman dapat disimpulkan bahwa, koefisien $k \geq 0$, atau mendekati nol artinya tingkat kesulitan relatif tinggi, karena tidak dapat merealisasikan rencana penerimaan sumber keuangan daerah dengan yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif kurang baik. Sehingga hipotesa dalam BAB II nomor 2 tidak terbukti.

Saran-saran

Dengan mencermati beberapa kesimpulan di atas peneliti dapat membuat saran-saran yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari potensi penerimaan keuangan daerah yang sangat responsif dan progresif terhadap perubahan PDRB daerah, maka dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di era otonomi daerah sekarang ini diperlukan adanya akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu dengan meningkatkan dan pengembangan investasi daerah.

2. Mencermati tingkat kesulitan realisasi penerimaan keuangan daerah yang relatif tinggi, sehingga tidak dapat mencapai target yang diharapkan, maka pemerintah daerah hendaknya melakukan pembaharuan di birokrasi yang berkaitan dengan keuangan daerah terutama meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang ada untuk bekerja lebih optimal lagi.
DAFTAR PUSTAKA


Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
